

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang mendorong pemerintah melaksanakan program bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ketepatan sasaran bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis birokrasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam pemanfaatan DTSEN pada penyaluran bantuan sosial tahun 2025. Penelitian ini menggunakan teori birokrasi Max Weber yang menekankan hierarki kewenangan, pembagian kerja, aturan formal, dan profesionalisme aparatur, serta teori *Street-Level Bureaucracy* Michael Lipsky yang menitikberatkan pada interaksi pelaksana dengan masyarakat, peran pelaksana lapangan, dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan DTSEN di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan melalui mekanisme birokrasi yang terstruktur dengan pembagian kewenangan, pembagian kerja, aturan formal, dan profesionalisme aparatur yang sesuai dengan karakteristik birokrasi Max Weber. Namun, efektivitas pemanfaatan DTSEN dalam mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala, antara lain proses verifikasi dan validasi data yang berjenjang, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung dinamis, keterbatasan sumber daya, serta perlunya koordinasi dan sinkronisasi data secara berkelanjutan. Di sisi lain, pendamping sosial memiliki peran penting sebagai pelaksana lapangan yang melakukan verifikasi kondisi masyarakat, memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Sosial, serta mendukung proses pembaruan data meskipun kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada tingkat birokrasi yang lebih tinggi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan DTSEN tidak hanya ditentukan oleh struktur birokrasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana lapangan dalam merespons dinamika kondisi masyarakat sehingga akurasi data dan ketepatan sasaran bantuan sosial dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: birokrasi, Dinas Sosial, DTSEN, bantuan sosial, Max Weber, Michael Lipsky, Kota Tasikmalaya.

ABSTRACT

Poverty is one of the social issues that drives the government to implement social assistance programs as a form of social protection and to improve public welfare. In its implementation, the accuracy of social assistance targeting is greatly influenced by the quality of the use of the National Social and Economic Single Data (DTSEN) as the basis for determining beneficiaries. This study aims to analyze the bureaucracy of the Tasikmalaya City Social Service in utilizing DTSEN in the distribution of social assistance in 2025. This study uses Max Weber's bureaucratic theory, which emphasizes the hierarchy of authority, division of labor, formal rules, and apparatus professionalism, as well as Michael Lipsky's Street-Level Bureaucracy theory, which emphasizes the interaction between implementers and the community, the role of field implementers, and resource limitations. The research method used was qualitative research with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation.

The results indicate that the utilization of DTSEN in the Tasikmalaya City Social Service has been implemented through a structured bureaucratic mechanism with a division of authority, division of labor, formal rules, and apparatus professionalism that aligns with Max Weber's bureaucratic characteristics. However, the effectiveness of DTSEN utilization in supporting accurate targeting of social assistance still faces various obstacles, including the multi-level data verification and validation process, the dynamic changes in community socioeconomic conditions, limited resources, and the need for ongoing data coordination and synchronization. On the other hand, social facilitators play a crucial role as field implementers who verify community conditions, facilitate communication between the community and the Social Services Agency, and support the data update process, although decision-making authority remains at a higher bureaucratic level.

This study concludes that the effectiveness of DTSEN utilization is not solely determined by the formal bureaucratic structure but also by the ability of field implementers to respond to dynamic community conditions, thereby continuously improving data accuracy and targeting of social assistance.

Keywords: *bureaucracy, Social Services, DTSEN, social assistance, Max Weber, Michael Lipsky, Tasikmalaya City.*